

ANALISIS KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

Policy analysis of food security of Muara Enim Regency

Elok Ilunanwati¹, Yayuk Farida Balliwati dan Dadang Sukdandar²

ABSTRAK

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan pembangunan untuk menjamin ketahanan pangan berkelanjutan. Salah satu sasaran yang perlu dicapai adalah jumlah ketersediaan pangan (dalam bentuk ketersediaan energi harian 2.200 kkal/kapita) serta beragam atas dasar gizi seimbang yang ditandai dengan pola makan diinginkan atau Pola Pangan harapan (PPH) dengan skor 100. Kondisi ketahanan pangan penduduk Kabupaten Muara Enim belum memadai. Oleh karena itu, penelitian retrospektif dengan tujuan utama untuk menganalisis kebijakan pemerintah dan pengembangan ketahanan pangan untuk mencapai kondisi keamanan pangan yang berkelanjutan dilakukan di Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Situasi ketersediaan pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2003-2009, rata-rata telah dapat memenuhi total kebutuhan kalori ideal (2.200 kkal/kapita/hari). Namun masih didominasi oleh padi-padian (beras), sedangkan untuk kelompok pangan lain masih belum mencukupi. Mutu ketersediaan pangan belum memenuhi skor PPH ketersediaan yang dianjurkan dan ditargetkan akan dicapai pada 2015 sesuai dengan SPM (standar pelayanan minimal) bidang ketahanan pangan. Konsumsi pangan dengan situasi penduduk pada tahun 2007 dan 2009 sudah melebihi jumlah yang dianjurkan dari 2.000 kkal/kapita/hari tetapi belum seimbang. Dalam kondisi, kualitas konsumsi pangan penduduk menunjukkan perbaikan tetapi belum mencapai kondisi ideal, 2) diperlukan penajaman dalam sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penetapan sasaran pembangunan secara kuantitatif.

KATA KUNCI : Ketersediaan pangan, pengembangan dokumen perencanaan

ABSTRACT

Food security is a mandatory of government affairs. It requires some forms of development planning in order to guarantee a sustainable food security. One of targets to be achieved is the amount of food availability (in the form of daily energy availability of 2.200 kcal/capita) as well as the diverse on the basis of balanced nutrition that is indicated by a desirable dietary pattern or pola pangan harapan (PPH) score of 100. Food security conditions of Muara Enim district residents have been inadequate. Therefore, retrospective study with the main objective to analyze the government policy and the development of food security to achieve sustainable food security conditions was conducted in Muara Enim district in South Sumatra Province. Study was conducted in September through October 2010. The results showed that 1) The yearly food supply situation in the Muara Enim district 2003-2009 been able to meet the ideal total caloric needs (2,200 kcal/capita/day) but it still dominated by grains (rice). Quality of food availability has not met the recommended score of PPH availability and targeted to be achieved by 2015 in accordance with the SPM (minimum service standards) in food security. Food consumption of the population situation in 2007 and 2009 already exceeds the recommended number of 2,000 kcal/cap/day but not yet balanced. In condition, the quality of food consumption

¹ Staf Kantor Ketahanan Pangan Kab. Muara Enim (alumni Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan Pasca Sarjana IPB)

² Pengajar pada Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan Pasca Sarjana IPB

showed improvement but residents have not reached the ideal conditions, 2) sharpening is needed in the synchronization between planning documents and development objectives in quantitative determination.

KEYWORDS : food availability, development planning document

PENDAHULUAN

Faktor penentu jumlah dan jenis pangan yang tersedia maupun yang dikonsumsi penduduk adalah : kondisi lingkungan dan faktor politik-budaya. Terkait hal tersebut, menurut Baliwati (2010) salah satu bentuk kewajiban pokok pemerintah (*core obligation*) yaitu menerbitkan peraturan; mengelola anggaran dan melakukan tindakan seperti tertulis dalam dokumen perencanaan, serta memastikan kebutuhan pangan terpenuhi (*obligation to result*).

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah daerah memiliki wewenang lebih besar dalam mengatur dan mengelola pembangunan daerah, termasuk pembangunan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah daerah sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang penyelenggaraannya berpedoman kepada standar pelayanan minimal (SPM).

Salah satu kabupaten yang mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi Lumbung Pangan adalah Kabupaten Muara Enim. Namun kondisi ketahanan pangan wilayah ini sendiri belum memadai. Kondisi ketahanan pangan antara lain ditunjukkan oleh situasi konsumsi pangan penduduk dan situasi ketersediaan pangan yang belum mencapai kondisi yang dianjurkan (konsumsi 2.000 kkal/kap/hari, ketersediaan 2.200 kkal/kap/hari dan skor PPH 100). Kondisi ketahanan

pangan daerah juga merupakan output dari perencanaan pembangunan dalam dokumen kebijakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) menganalisis situasi konsumsi, dan ketersediaan pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2003-2009, 2) menganalisis konsistensi dan keterpaduan kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Muara Enim.

BAHAN DAN METODA

Desain penelitian ini adalah *restrospektif*. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa; Kabupaten Muara Enim sebagai wilayah yang mendukung Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan, tetapi masih menjadi prioritas penanganan daerah rawan pangan, Penelitian dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2010.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut waktu meliputi data ketersediaan pangan, konsumsi pangan, rencana strategis (renstra) kabupaten dan renstra SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer Microsoft Excell 2007, kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Konsumsi, Ketersediaan dan Produksi Pangan Penduduk Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan hasil survey konsumsi pangan yang dilaksanakan atas kerja sama Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim tahun 2007 dan 2009, ditampilkan situasi konsumsi pangan penduduk pada Tabel 1. Dari jumlah total konsumsi pangan, maka tingkat konsumsi pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2007 dan 2009 sudah melebihi angka

yang dianjurkan yaitu 2.000 kkal/kap/hari. Jika dihitung dari persentase angka kecukupan energi (% AKE), maka tingkat konsumsi penduduk sudah mencapai 107 persen dan 105 persen dari jumlah ideal. Angka tersebut tergolong normal (TKE 90-119%) menurut klasifikasi tingkat konsumsi energi Departemen Kesehatan tahun 1996 (Hardinsyah, 2002).

Tabel 1 Situasi konsumsi pangan aktual penduduk Kabupaten Muara Enim dibandingkan dengan konsumsi ideal (kkal/kapita/hari)

No	Kelompok Pangan	Konsumsi (kkal/kap/hari)			Rata-rata Gap	Laju (%)
		Ideal	Thn 2007	Thn 2009		
1	Padi-padian	1.000	1.758	1.560	659	-11
2	Umbi-umbian	120	13	17	-105	29
3	Pangan hewani	240	80	184	-108	130
4	Minyak dan lemak	200	97	103	-100	6
5	Buah/biji berminyak	60	79	77	18	-3
6	Kacang-kacangan	100	8	12	-90	50
7	Gula	100	48	55	-48.5	14
8	Sayur dan buah	120	57	82	-50.5	44
9	Minuman dan bumbu	30		1	-29.5	
	Jumlah	2.000	2.140	2.090	115	-2

Sumber: KKP, 2007 dan 2009

Dari komposisi kelompok pangan pada tabel diatas, konsumsi pangan penduduk masih dibawah angka yang dianjurkan kecuali untuk kelompok padi-padian dan buah/biji berminyak. Hal tersebut ditunjukkan oleh gap (selisih konsumsi aktual dan ideal) positif untuk padi-padian dan buah/biji berminyak, serta gap negatif untuk kelompok pangan lainnya. Tetapi terjadi peningkatan konsumsi pada enam kelompok pangan ditunjukkan oleh laju yang positif. Peningkatan konsumsi pangan hewani bahkan mencapai 130 persen. Disisi lain konsumsi padi-padian dan buah/biji berminyak terjadi penurunan (laju negatif). Artinya konsumsi pangan penduduk berubah menuju

keseimbangan sesuai pola pangan harapan.

Sejalan dengan hal diatas, mutu konsumsi pangan penduduk Kabupaten Muara Enim menunjukkan peningkatan kualitas dengan meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi sebesar (35 persen) yaitu dari 51 pada tahun 2007 menjadi 70,1 pada tahun 2009 (Tabel 2). Peningkatan skor tersebut terutama disumbangkan oleh kenaikan pesat pada skor PPH pangan hewani (125 persen) serta sayur dan buah (46 persen).

Tabel 2 Perbandingan skor PPH konsumsi aktual penduduk Kabupaten Muara Enim dengan skor PPH konsumsi ideal dan PPH konsumsi nasional

No	Kelompok Pangan	Skor PPH Konsumsi				Laju (%)	
		Ideal	Nasional*		Kab. ME		
			Tahun 2007	Tahun 2009	Tahun 2007		Tahun 2009
1	Padi-padian	25	25,0	25,0	25,0	25,0	0
2	Umbi-umbian	2,5	1,6	1,2	0,0	0,4	-
3	Pangan hewani	24	15,5	14,8	8,0	18,0	125
4	Minyak dan lemak	5	5,0	4,9	2,0	2,6	30
5	Buah/biji berminyak	1	1,0	0,9	1,0	1,0	0
6	Kacang-kacangan	10	7,3	5,7	1,0	1,2	20
7	Gula	2,5	2,4	2,2	1,0	1,4	40
8	Sayur dan buah	30	25,1	21,0	14,0	20,5	46
9	Minuman dan bumbu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Jumlah	100	82,8	75,7	52,0	70,1	35

Keterangan : *) Susenas BPS diolah BKP

Membairnya konsumsi pangan diperkirakan karena membairnya harga komoditas perkebunan, yang menjadi sumber pendapatan utama sebagian besar penduduk. Dengan demikian akses ekonomi penduduk terhadap pangan (daya beli) dapat mengimbangi harga jenis pangan hewani serta sayur dan buah yang harganya cenderung lebih mahal dari jenis pangan lainnya.

Ketersediaan pangan bagi penduduk Kabupaten Muara Enim ditunjukkan dengan jumlah ketersediaan energi per kapita per hari (kkal/kapita/hari). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kondisi ketersediaan energi berfluktuasi seperti ditunjukkan

pada Tabel 3. Total energi ketersediaan pada tahun 2004 dan 2008, masih dibawah standar 2.200 kkal/kap/hari. Tetapi ketersediaan pangan pada tahun 2005-2007 sudah melebihi standar ketersediaan energi yang dianjurkan. Secara umum kelompok padi-padian memberikan kontribusi energi terbesar dari total jumlah energi ideal yang diharapkan (2.200 kkal/kap/hari). Selain itu kontribusi kelompok pangan minuman dan bumbu juga memiliki ketersediaan energi yang cukup besar terhadap total energi. Kelompok pangan lainnya masih berada dibawah angka ketersediaan yang dianjurkan.

Tabel 3 Perkembangan ketersediaan energi/kapita/hari penduduk Kab. Muara Enim

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan (kkal/kap/hari)						Rata-rata Laju(%)
		Ideal	2004	2005	2006	2007	2008	
1	Padi-padian	1.100	1.478	1.728	1.314	1.458	1.293	-1,85
2	Umbi-umbian	132	101	85	63	80	104	3,82
3	Pangan hewani	264	142	180	167	151	141	0,83
4	Minyak dan lemak	220	95	227	117	127	0	-0,24
5	Buah/biji berminyak	66	28	20	27	18	8	-20,62
6	Kacang-kacangan	110	27	29	21	23	25	-0,49
7	Gula	110	63	72	41	46	26	-15,01
8	Sayur dan buah	132	31	27	319	171	111	246,77
9	Minuman dan bumbu	66	151	145	161	358	289	27,54
	Jumlah	2.200	2.116	2.513	2.23	2.432	1.997	-0,33
	% AKE	100	98,16	115,05	101,36	110,55	90,77	-0,88

Sumber: NBM Kabupaten Muara Enim tahun 2005-2009

Angka total ketersediaan energi aktual tahun 2004-2008 dibandingkan dengan angka kecukupan energi untuk dihitung tingkat persentase angka kecukupan energi (%AKE). Tingkat ketersediaan energi mencerminkan besarnya proporsi ketersediaan energi aktual di Kabupaten Muara Enim dengan standar energi ideal yang diharapkan yaitu 2.200 kkal/kap/hari. Pada tahun 2004, angka kecukupan energi (% AKE) ketersediaan dibawah angka yang dianjurkan (100 persen) yaitu hanya 96,18 persen. Demikian juga pada tahun 2008, yang angka kecukupan energi ketersediaannya hanya 90,77 persen. Sedangkan untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 sudah berada diatas 100 persen. Secara umum tingkat ketersediaan pangan di Kabupaten Muara Enim cenderung menurun.

Rata-rata laju ketersediaan kelompok pangan menunjukkan bahwa hampir semua kelompok pangan kondisinya negatif kecuali umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah, minuman dan bumbu. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam

mengevaluasi dan menyusun perencanaan pembangunan ketahanan pangan. Terutama dalam membangun kemandirian penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal yang dimiliki.

Selain tingkat ketersediaan, mutu ketersediaan energi juga diukur untuk mengetahui keberagaman ketersediaan pangan dengan skor PPH ketersediaan. Angka ideal skor PPH ketersediaan adalah 100, ditargetkan akan dicapai pada tahun 2015 secara nasional. Total skor PPH ketersediaan Kabupaten Muara Enim cenderung meningkat kecuali tahun 2008 (Tabel 4). Padi-padian sudah memenuhi skor PPH ideal, tetapi untuk kelompok pangan lain masih dibawah skor PPH ideal. Dari laju perkembangan skor PPH masing-masing kelompok pangan, secara umum menunjukkan kenaikan mutu ketersediaan pangan terutama untuk sayur dan buah. Ketersediaan pangan diharapkan dapat terus ditingkatkan jumlah dan mutunya agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk menuju ideal, yang meningkat mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk.

Tabel 4 Skor dan rata-rata laju PPH ketersediaan pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2004-2008

No	Kelompok Pangan	Skor PPH Ketersediaan					Rata-rata Laju(%)	
		Ideal	Thn 2004	Thn 2005	Thn 2006	Thn 2007		Thn 2008
1	Padi-padian	25	25	25	25	25	25	0
2	Umbi-umbian	2.5	2	2	1	2	2	50
3	Pangan hewani	24	13	16	15	14	13	8
4	Minyak dan lemak Buah/biji	5	2	5	3	3	0	85
5	berminyak	1	1	0	1	0	0	-
6	Kacang-kacangan	10	2	3	2	2	2	17
7	Gula	2.5	1	2	1	1	1	50
8	Sayur dan buah Minuman dan	30	7	6	30	30	25	382
9	bumbu	0.0	0	0	0	0	0	-
Jumlah		100	53	59	78	77	68	39

Konsistensi dan keterpaduan antar dokumen kebijakan

Perencanaan pembangunan kabupaten/kota merupakan keseluruhan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang tersusun dalam dokumen-dokumen perencanaan secara sistematis, terpadu, konsisten dan berjenjang menurut jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan kabupaten/kota disusun dalam kerangka untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di kabupaten/kota dalam mewujudkan kondisi kabupaten/kota yang diharapkan (visi, misi dan tujuannya).

Dengan pola pikir perencanaan yang sistematis dan berjenjang tersebut, maka muatan/isi dari jenis-jenis perencanaan yang ada harus padu (saling keterkaitan) dan konsisten (saling mendukung dan tidak saling bertentangan). Terpadu atau saling keterkaitan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota mencakup keterkaitan antar wilayah, antar bidang,

dan antar sektor, serta antar program dan kegiatan yang direncanakan dalam suatu jenis perencanaan.

Konsistensi perencanaan pembangunan menyangkut relevansi/kesesuaian muatan/isi antara jenis perencanaan pembangunan yang satu dengan yang lainnya (isi Rencana Kerja Pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM, dan isi RPJM sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang/RPJP). Antar jenis perencanaan juga menggambarkan konsistensi proses pergerakan dari bawah ke atas (*bottom up*) dan dari atas ke bawah (*top down*).

Oleh karena itu perlu diketahui konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Muara Enim dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Nasional untuk menjamin terwujudnya tujuan pembangunan ketahanan pangan mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Konsisten artinya relevansi/kesesuaian muatan/isi antara jenis perencanaan pembangunan (isi RKP sesuai dengan RPJM, isi RPJM

sesuai dengan RPJP). Sedangkan keterpaduan adalah keterkaitan perencanaan antar wilayah, antar bidang dan sektor, antar program dan kegiatan yang direncanakan dalam suatu jenis perencanaan.

Pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa terdapat ketidakterpaduan pada prioritas pembangunan kelima yaitu ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Muara Enim hanya diterjemahkan menjadi revitalisasi pertanian, yang lingkupnya lebih sempit dari ketahanan pangan.

Pengertian ketahanan pangan jauh lebih luas daripada revitalisasi

pertanian. Ketahanan pangan meliputi tiga subsistem yaitu ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian maka revitalisasi pertanian hanya bagian dari sub sistem ketersediaan dalam sistem ketahanan pangan.

Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Muara Enim agar arah pembangunan ketahanan pangan sebagai urusan wajib dapat lebih jelas dan tajam untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yang diharapkan, melalui dukungan komitmen kebijakan dan anggaran.

Tabel 5. Analisis konten terhadap konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan

No	Prioritas Pembangunan		
	Nasional tahun 2010-2014	Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011	Kabupaten Muara Enim Tahun 2011
1	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
2	Pendidikan	Pemantapan pengembangan SDM	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
3	Kesehatan		Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat
4	Penanggulangan kemiskinan	Penajaman program penanggulangan kemiskinan	
5	Ketahanan pangan	Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah pertanian	Revitalisasi pertanian

Penelusuran pada rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (SKPD), diketahui penetapan target produksi pada masing-masing unit kerja

terkait adalah seperti pada Tabel 6. Jenis komoditas pangan ditampilkan sesuai dengan pembahasan pada uraian subbab sebelumnya.

Tabel 6 Perbandingan pertumbuhan produksi pangan dari SKPD terkait

No	SKPD	Komoditas	Pertumbuhan Produksi (%)	
			Th 2006-2008	Th 2009-2013
1	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Padi	3,09	2,63
		Ubi kayu	1,53	3,29
		Kedelai	4,95	31,25
		Kacang panjang	-40,42	2,16
		Tomat	-66,45	2,56
		Jeruk	61,58	1,29
		Nanas	-19,03	2,1
2	Dinas Peternakan dan Perikanan	Daging	0,8	1,5
		Telur	3	2
		Ikan	1,15	1
3	Dinas Perkebunan	Kelapa	185,97	27,65

Penetapan proyeksi pertumbuhan produksi tahun 2009-2013, didasarkan pada angka pertumbuhan tertentu seperti pada Dinas Peternakan Dan Perikanan. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan, penetapan target produksi didasarkan pada sejumlah pangan yang harus diproduksi. Namun tidak ditemukan dasar pertimbangan besaran angka tersebut dalam rencana strategis ketiga SKPD tersebut.

Selanjutnya dari hasil analisis konten terhadap konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan dan analisis kelembagaan ketahanan pangan di Kabupaten Muara Enim tahun 2010 diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Diperlukan penajaman dalam sinkronisasi antar dokumen perencanaan (RPJMD Kabupaten Muara Enim, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJMN serta antara Renstra kabupaten Muara Enim dengan Renstra SKPD). Karena makna ketahanan pangan adalah lebih luas daripada revitalisasi pertanian.

b. Diperlukan sinkronisasi penetapan sasaran pembangunan secara kuantitatif. Situasi ketersediaan/konsumsi pangan aktual dan harapan, seharusnya menjadi dasar penetapan sasaran produksi pangan bagi SKPD terkait terutama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Dinas Perkebunan.

KESIMPULAN

1. Situasi ketersediaan pangan penduduk Kabupaten Muara Enim tahun 2003-2009, rata-rata telah dapat memenuhi total kebutuhan kalori ideal (2.200 kkal/kapita/hari). Namun masih didominasi oleh padi-padian (beras), sedangkan untuk kelompok pangan lain masih belum mencukupi. Mutu ketersediaan pangan belum memenuhi skor PPH ketersediaan yang dianjurkan dan ditargetkan akan dicapai pada 2015 sesuai dengan SPM (standar pelayanan minimal) bidang ketahanan pangan.

2. Hasil analisis konsistensi dan keterpaduan antar dokumen kebijakan pembangunan ketahanan pangan menunjukkan bahwa antar dokumen perencanaan masih kurang konsisten dan terpadu, serta belum adanya keterpaduan penetapan sasaran produksi pangan. Untuk itu diperlukan; a) penajaman dalam sinkronisasi antar dokumen perencanaan (renstra SKPD) dan b) penetapan sasaran pembangunan secara kuantitatif (situasi ketersediaan/konsumsi pangan aktual dan harapan menjadi dasar penetapan sasaran produksi pangan bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perkebunan).

DAFTAR PUSTAKA

Baliwati, YF, dkk. 2010. Kebijakan Strategis untuk Mewujudkan

Ketahanan Pangan Wilayah yang Berkelanjutan. Materi Pelatihan. Diperbanyak oleh MWA Tarining and Consulting Lembaga Tata Kelola Ketahanan Pangan. Bogor.

Hardinsyah, S. Madanijah dan Y.F. Baliwati. 2002. Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan untuk Perencanaan Ketersediaan Pangan. PSKPG-IPB dan Pusat Pengembangan Ketersediaan Pangan, Departemen Pertanian RI. Jakarta.

[PP] Peraturan Pemerintah. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.

[UU] Undang-Undang. 1996. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.